

Bangunan yang didirikan diatas tanah hak guna bangunan pihak lain : tinjauan yuridis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 78PDT.G/2011/PN.PLG dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 26/G/2011/PTUN-PLG = Building which is built on other entity's the right of building : juridical review decision of Palembang District Court Number 78PDT.G/2011/PN.PLG and Decision of Palembang State Administrative Court number 26/G/2011/PTUN.PLG / Neneng Lela Fitriani

Neneng Lela Fitriani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20364966&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

### **<b>ABSTRAK</b><br>**

Penguasaan atas tanah secara nyata dapat dilihat dari hubungan seseorang atau suatu badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya dengan suatu bidang tanah tertentu sebagai objeknya. Keterbatasan lahan membuat manusia mencari cara agar kebutuhan akan lahan dapat dipenuhi. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengadakan perjanjian pinjam pakai tanah. Perjanjian pinjam pakai tanah memiliki jangka waktu terbatas yang berakibat ketika jangka waktu berakhir maka tanah harus dikembalikan kepada pemilik tanah. Lalu menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan perlindungan hukum terhadap pemilik bangunan yang telah mendirikan bangunan diatas tanah tersebut. Terlebih lagi, jika tanah tempat bangunan berdiri adalah tanah hak guna bangunan milik negara yang diberikan kepada suatu badan hukum tertentu. Pada akhirnya perlindungan hukum kepada pemilik bangunan diberikan ketika pemilikan bangunan tersebut dilandasi dengan kepemilikan yuridis yang sah.

<hr>

### **<b>ABSTRACT</b><br>**

Land acquisition can be seen from the relationship of person or a legal entity as the holder of certain rights to a particular parcel of land as its object. Limited land makes human look for ways so the land needs can be fulfilled. One of the ways is to make the land lease agreement. Land lease agreement has a limited period of time and when the time ends, the land must be returned to the landowner. Then the problem is how legal protection can be given to the owner of the building that has been building on that land. The problems can be complex when the land stands to the right of building on the land state which is given to a particular legal entity. At the end, legal protection can be given to the building owner when ownership of the building was based on the legitimate juridical possession.